BAB III
PROFL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Sejarah Pendirian - 1961

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Perubahan Badan usaha - 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Peningkatan Aktivitas - 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan " Bank Jabar " dengan logo baru.

Perubahan Bentuk Hukum - 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perluasan Bentuk Usaha – Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Perubahan Nama dan *Call Name* Perseroan – 2007

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (*call name*) Bank Jabar Banten. Produk dan jasa yang terdapat dalam proses bisnis bank bjb antara lain :

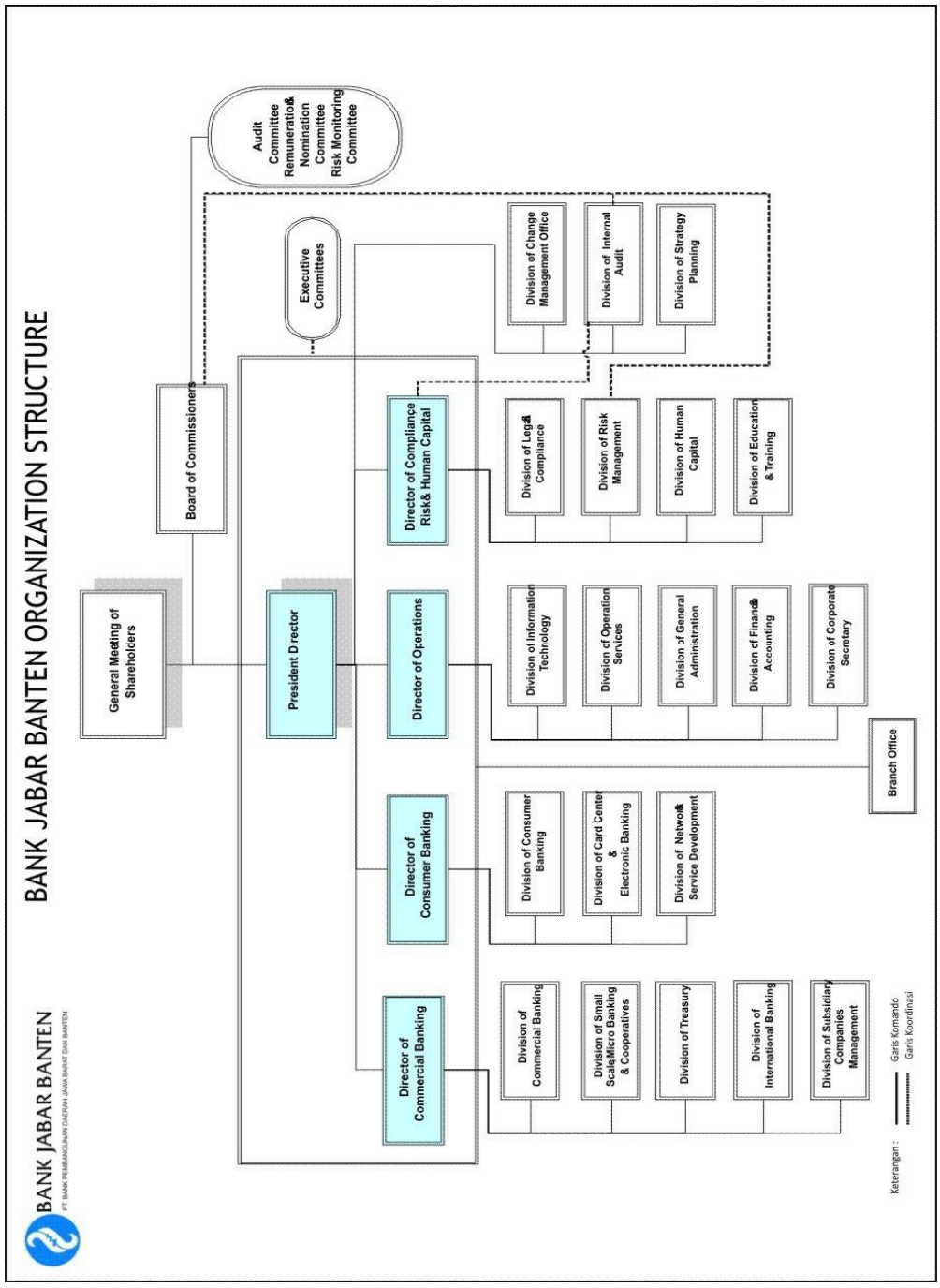
1. Produk treasury
2. Layanan transaksi luar negeri (kiriman uang/remittance)

3. Layanan transaksi luar negeri (trade finance & service)
4. Pendanaan
5. Layanan
6. Kredit
7. Produk dan layanan syariah
8. DPLK (dana pensiun lembaga keuangan)

Gambar 3.1

Logo Bank BJB Cabang Utama Bandung

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.2

Struktur Organisasi Bank BJB Cabang Utama Bandung

3.3. Desripsi Kerja

1. Teller

   Bagian teller bertugas untuk :

   a. Menginptkan etiap transaksi yang dilakkan nasabah setiap harinya
   b. Melakukan pengecekan formulir transaksi Kiriman Uang, Kliring, dll
   c. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan / persyaratan data nasabah yang diperlukan
   d. Menghitung jumlah uang nasabah untuk transaksi yang dilakukan

2. Petugas RTGS

   Bagian operator RTGS (petugas RTGS) betugas untuk :

   a. Melakukan construct (input data) nasabah dengan doumen-dokumen yang ditetapkan sebagai landasan dilakukannya suatu transaksi
   b. Melakukan amend (pengubahan data) transaksi dana pada operasional sistem BI-RTGS
   c. Mencetak berkas transaksi yang telah dilakukan pre-aproval dan final-approval
   d. Melakuka pengarsipan dokumen-dokumen yang telah sukses pre-approval danfnal-approval denan berka-berkas laiinya yang telah dicetak

3. Manajer ADM DJDN

   Bagian manajer ADM DJDN bertugas untuk :

   a. Melakukan pre-apprval dokumen KU-RTGS, inkaso, kliring, pajak
   b. Melakukan pengecekan terhadap proses yang berhubungan dengan divisi ADM DJDN
   c. Memeriksa laporan-laporan semua bagian yang ada pada divisi ADM DJDN

4. Supervisor

   Bagian supervisor bertugas untuk melakukan fungsi final-aproval, reject atau cancel atas transaksi yang telah di construct oleh operator RTGS.